

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGKEP

**RIFKA ANNISA
A011171312**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGKEP

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

**RIFKA ANNISA
A011171312**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGKEP

disusun dan diajukan oleh:

RIFKA ANNISA

A011171312

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, November 2021

Pembimbing I



Dr. Fatmawati, SE., M.Si.
NIP. 19640106 198803 2 001

Pembimbing II



Acc untuk
Mengikuti Ujian

Mirzalina Zaenal, SE., M.S.E
NIP. 19870111 201404 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Pattah, SE., M.Si.CWM®
NIP. 19690413 199403 1003

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGKEP

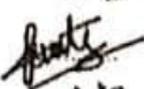
disusun dan diajukan oleh:

RIFKA ANNISA

A011171312

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **13 Desember 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fatmawati, SE., M.Si	Ketua	
2.	Mirzalina Zaenal, SE., M.S.E	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., PhD.	Anggota	3. 
4.	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.
NIP. 19690413 199403 1003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa : Rifka Annisa
Nomor Pokok : A011171312
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul ***Analisis Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Pangkep*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Desember 2021

Yang Menyatakan,



No. Pokok: A011171312

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis hanturkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan kelak mampu memberikan syafaat pada kita semua.

Skripsi dengan judul “ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGKEP” disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapat dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, penulis mencoba menyajikan karya penulisan yang sebaik-baiknya, namun skripsi ini juga tidak luput dari kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan peneliti.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampakan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orang tua tersayang dan tercinta yang telah menjadi *Support System* utama penulis, untuk ayahanda Lukman Tajuddin dan ibunda Fatima Hamid yang telah banyak mendoakan, mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang yang tak terhingga. Untuk Almarhum papah, semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untukmu disisi-Nya, terima kasih untuk perjuanganmu demi menunjang Pendidikan ku selama ini. Maafkan anakmu yang belum sempat membahagiakanmu. Untuk mamah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan kemuliaan atas semua jasamu. Kepada saudaraku tersayang Nurul Fadhilah, Khaeriyah Emilia, Muh.Munawwir, Ahmad Fauzi, dan adik bungsuku yang tercinta

Syakira Raihana yang selama ini memberikan dorongan baik berupa materi dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungannya kepada peneliti.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan baik berupa pikiran dan tenaga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Olehnya itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina M.A Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si, CIPM, CWM[®], CRA., CRP.Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Mahlia Muis, SE., M.Si., CWM[®] selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si. AK., CA., CWM[®]., CRP., CRA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. H. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM[®] selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM[®] Selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E, M.Si. Selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D selaku Penasihat Akademik peneliti yang memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi kepada peneliti selama menjalankan studi di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mirzalina Zaenal, SE., M.S.E selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran dan waktu yang

telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan kedua Ibu dosen pembimbing. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kedua Ibu dosen pembimbing.

6. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri , M.A., Ph.D dan Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si Selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan waktu, kritik, saran dan motivasi yang membangun dalam penyempurnaan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, arahan, bimbingan dan nasihat kepada peneliti selama menimba ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Kepada segenap Pegawai Departemen Ilmu Ekonomi, Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah membantu dalam pengurusan administrasi, persuratan maupun berkas yang dibutuhkan hingga mengikuti ujian.
9. Sahabat-sahabatku Dari IE Sampai Surga (DISS) yaitu: Risdianti Putri, Arnida Nur, Riskawati, Nurul Hikmah, Novya Muharikka Izzah, Kamelia Bakri, dan Utari Pangastuti. Terima kasih telah memberikan segenap bantuan baik berupa arahan serta pemikiran yang sangat membantu peneliti serta terima kasih selalu menemani disaat masa-masa studi dan senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Semoga kita tetap menjalin persahabatan ini hingga surga kelak.
10. Keluarga Andy yaitu: Andi Marwati Aldina, Rahmi, Nurainun, Indah Pratiwi Bachtiar, Delvia Datu Padang, Aslinda Sara, Abd.

Rahman Haris, Muhammad Alwi, dan Anugerah yang sangat membantu peneliti selama masa studi.

11. Teman-teman ERUDITE yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan, dan doa. Terimakasih banyak atas segala pengalaman selama masa-masa studi. Semoga Allah SWT memudahkan jalan kita menuju cita-cita masing-masing.
12. Teman-teman KMMDI FEB UH dan KSEI FoSEI Unhas. Terima kasih atas segala pengetahuan, arahan, dan wawasan yang diberikan selama ini. Pengalaman selama berproses adalah hadiah yang tak pernah peneliti lupakan.
13. Sahabat kecilku, Siti Rosyidah, Saeful, Riska Arifin, Nur Qadriyanti, Fitri Arini, Muh. Risman Daris, dan Khaeril Angga. Terima kasih hingga detik ini masih memberikan peneliti bantuan baik berupa motivasi dan doa. Semoga persahabatan kita tetap utuh dan masing-masing dimudahkan dalam mencapai cita-cita, Amiin.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa hingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, semoga penelitian ini bisa berguna bagi pembaca dan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan.

Makassar, 13 Desember 2021

Penulis,

Rifka Annisa

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGKEP

Rifka Annisa
Fatmawati
Mirzalina Zaenal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah sektor pariwisata terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangkep, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, dan DJPK Kementerian Keuangan. Adapun data yang digunakan yaitu data *time series* tahun 2006 sampai 2019 dan dianalisis menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan bantuan aplikasi SPSS 26. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep. Adapun jumlah obyek wisata, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep.

Kata Kunci: Wisatawan, Obyek Wisata, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah Sektor Pariwisata, Retribusi Pariwisata

This study aims to analyze the effect of the number of tourists, the number of tourism objects, economic growth, and government spending in the tourism sector on the receipt of user fees for the tourism sector in Pangkep Regency. This study uses secondary data obtained from the Department of Tourism and Culture (Disparbud) of Pangkep Regency, the Central Statistics Agency (BPS) of South Sulawesi Province, and the DJPK of the Ministry of Finance. The data used is time series data from 2006 to 2019 and analyzed using the Ordinary Least Square (OLS) method with the help of the SPSS 26 application. The results show that the number of tourists affects the receipt of levies on the tourism sector in Pangkep Regency. And then the number of tourism objects, economic growth, and government spending in the tourism sector have no effect on the receipt of levies for the tourism sector in Pangkep Regency.

Keywords: *Tourists, Tourism Objects, Economic Growth, Government Expenditures for the Tourism Sector, Tourism Retribution*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teoritis.....	10
2.1.1 Pendapatan Daerah.....	10
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
2.1.3 Retribusi Daerah.....	14
2.1.4 Industri Pariwisata.....	15
2.1.5 Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata.....	18
2.1.6 Wisatawan.....	10
2.1.7 Obyek Wisata.....	22
2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.1.9 Belanja Pemerintah Sektor Pariwisata.....	24
2.1.10 Kaitan Teoritis Wisatawan dan Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata.....	27
2.1.11 Kaitan Teoritis Obyek Wisata dan Penerimaan Retribusi	

Sektor Pariwisata	28
2.1.12 Kaitan Teoritis Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata	29
2.1.13 Kaitan Teoritis Belanja Pemerintah Sektor Pariwisata dengan Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata	30
2.2 Hasil Penelitian dan Studi Empiris	31
2.3 Kerangka Pemikiran	34
2.4 Hipotesis Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	37
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4 Metode Analisis Data	38
3.5 Definisi Operasional Variabel	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	44
4.1.1 Keadaan Geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	44
4.1.2 Kemandirian Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ..	45
4.1.3 Potensi dan Prospek Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	47
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian	49
4.2.1 Perkembangan Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2019.....	49
4.2.2 Perkembangan Jumlah Wisatawan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2019.....	51
4.2.3 Perkembangan Jumlah Obyek Wisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2019.....	53
4.2.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019.....	55
4.2.5 Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Pariwisata Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2005-2019	57

4.3	Hasil Estimasi Variabel-Variabel Penelitian.....	59
4.3.1	Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda.....	59
4.3.2	Pengujian Asumsi Klasik	68
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan PAD Secara Keseluruhan dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Pangkep Periode 2016-2019	4
Tabel 1.2	Perbandingan Kontribusi Pajak Pariwisata dan Retribusi Pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Pangkep Tahun 2015-2019	5
Tabel 4.1	Perbandingan Realisasi Penerimaan Daerah Secara Keseluruhan dan PAD Kabupaten Pangkep Periode 2006-2019.....	46
Tabel 4.2	Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Pangkep Tahun 2006-2019.....	54
Tabel 4.3	Hasil Estimasi Pengaruh Jumlah Wisatawan (X1), Jumlah Obyek Wisata (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X3), dan Belanja Pemerintah Sektor Pariwisata (X4) terhadap Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata Kab. Pangkep (Y) tahun 2006-2019	59
Tabel 4.4	Uji Normalitas Data	68
Tabel 4.5	Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.6	Uji Multikolinearitas	71
Tabel 4.7	Uji Heteroskedastisitas	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Pangkep Periode 2015-2019	6
Gambar 2.1	Kerangka Konsep Penelitian.....	35
Gambar 4.1	Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020	45
Gambar 4.2	Realisasi Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Pangkep Tahun 2006-2019	50
Gambar 4.3	Jumlah Wisatawan di Kabupaten Pangkep Tahun 2006-2019.....	52
Gambar 4.4	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2019	55
Gambar 4.5	Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Pariwisata di Kabupaten Pangkep Tahun 2006-2019	57
Gambar 4.6	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Pangkep Tahun 2015-2019	67
Gambar 4.7	Grafik Normal <i>Probability Plot</i>	69
Gambar 4.8	Grafik <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas.....	71

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam tersebut jika dikelola dengan baik dapat dijadikan sebagai potensi pemasukan untuk devisa negara. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni melalui pengembangan dalam industri pariwisata. Sektor ini diyakini akan meningkatkan pendapatan negara baik melalui pajak maupun retribusi sektor pariwisata.

Terdapat setidaknya lima dampak positif pengembangan pariwisata yakni pendapatan dari nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan perekonomian masyarakat lokal (Utama & Rai, 2011). Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Yakup, 2019).

Dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah, maka memberikan peluang yang selebar-lebarnya bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal guna meningkatkan kemandirian daerah itu sendiri. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan sumber-sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping meningkatkan pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada, juga diharapkan mampu menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD lainnya sehingga daerah memiliki sumber pendapatan yang lebih luas lagi.

Salah satu daerah yang memiliki kebutuhan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2014-2025, memiliki Visi “Kepariwisataan Kabupaten Pangkajene & Kepulauan yang berbasis kepada wisata bahari dan ekowisata yang berdaya saing dan berwawasan Global pada tahun 2025” (Trihayuningtyas et al., 2018). Dengan adanya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep.

Kabupaten Pangkep mempunyai sumberdaya dan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah di bidang pariwisata, mengingat Kabupaten Pangkep yang juga diberi julukan “kota tiga dimensi”

karena keunikan struktur wilayahnya yang mencakup daratan, pegunungan, hingga kepulauan. Dengan mengembangkan pariwisata tersebut secara optimal maka akan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 tentang Penetapan Obyek Wisata Pangkep, menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkep setidaknya tercatat memiliki total 61 obyek wisata yang terdiri dari 19 wisata bahari, 2 wisata agro boledong, 2 wisata sungai, 2 wisata budaya, 7 wisata religi, 26 wisata alam, dan 3 wisata kuliner. Keseriusan Pemerintah untuk memberi penguatan pada sektor pariwisata Kabupaten Pangkep dapat dilihat dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kepariwisataan. Berdasarkan hal tersebut, sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep seharusnya bisa menjadi sektor yang berperan penting dalam perekonomian daerah, utamanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep itu sendiri.

Sementara itu sektor pariwisata yang direncanakan menjadi salah satu sektor pendapatan masa depan Pangkep sampai saat ini belum bisa menyumbang penerimaan secara optimal. Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan kontribusi PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Pangkep. Dapat dilihat bahwa persentase kontribusi PAD Sektor Pariwisata dibandingkan dengan PAD Secara Keseluruhan, paling tinggi hanya terjadi

pada tahun 2015 dengan tingkat persentase yang hanya 1.37 persen dan terus menunjukkan *trend* yang cenderung menurun hingga tahun 2019. Namun dapat dilihat bahwa secara nominal, PAD Sektor Pariwisata selama tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan *trend* yang meningkat. Jadi walaupun sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1 Perbandingan PAD Secara Keseluruhan dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Pangkep Periode 2015-2019

TAHUN	PAD Secara Keseluruhan (Rp)	PAD Sektor Pariwisata (Rp)	Kontribusi Sektor Pariwisata (%)
2015	16.915.168.978	231.864.000	1.37
2016	139.001.821.623	331.184.500	0.24
2017	98.168.716.051	423.950.000	0.43
2018	103.823.609.542	389.831.000	0.38
2019	105.445.412.627	1.263.568.056	1.20

Sumber: DJPK Kemenkeu dan Disparbud Kab. Pangkep (data diolah)

Keberadaan sejumlah obyek wisata di Kabupaten Pangkep kemudian terus disorot. Pasalnya dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep. Sektor pariwisata yang ada saat ini, tidak berjalan maksimal. Bahkan ada obyek wisata yang terbengkalai sehingga ditutup oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut kemudian membuat kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep selaku pengelola sektor pariwisata utamanya obyek wisata terus dipertanyakan oleh berbagai pihak.

Penerimaan sektor pariwisata sendiri bersumber dari pajak dan retribusi pariwisata. Tabel 1.2 berikut menunjukkan kontribusi pajak dan

retribusi pariwisata terhadap PAD sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep tahun 2015-2019. Dapat dilihat bahwa kontribusi pajak pariwisata terhadap PAD sektor pariwisata baik secara nominal maupun persentase selama tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan *trend* yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini berbanding terbalik dengan kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD sektor pariwisata yang baik secara nominal maupun persentase selama tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan *trend* yang menurun setiap tahunnya.

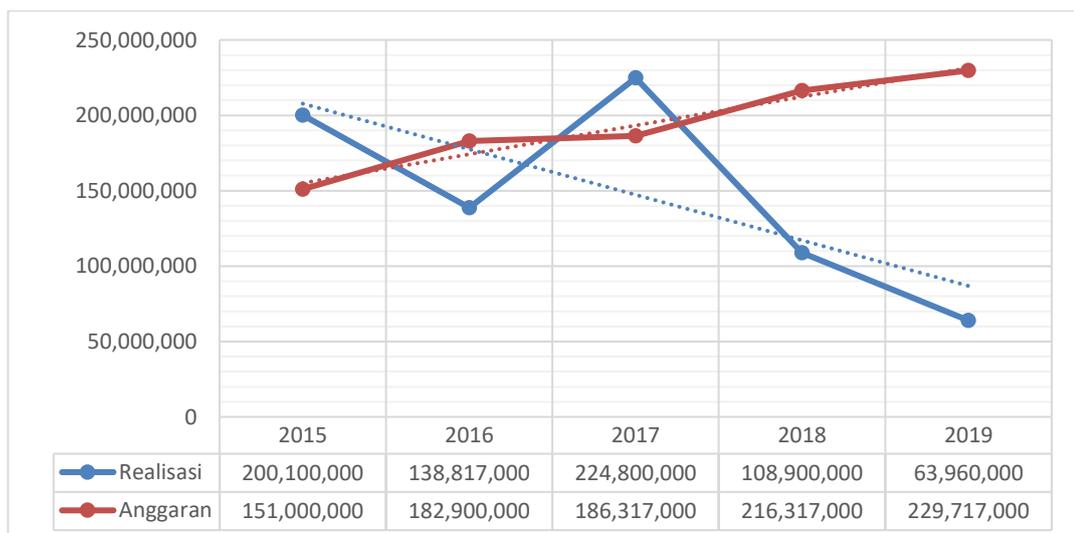
Tabel 1.2 Perbandingan Kontribusi Pajak dan Retribusi Pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Pangkep Tahun 2015-2019

TAHUN	PAD PARIWISATA	PAJAK PARIWISATA		RETRIBUSI PARIWISATA	
		Total Pajak (Rp)	Kontribusi Pajak Pariwisata (%)	Total Retribusi (Rp)	Kontribusi Retribusi Pariwisata (%)
2015	231,864,000	31,764,000	13.70	200,100,000	86.30
2016	331,184,500	192,367,500	58.08	138,817,000	41.92
2017	453,950,000	229,150,000	50.48	224,800,000	49.52
2018	359,831,000	250,931,000	69.74	108,900,000	30.26
2019	1,263,568,056	1,199,608,056	94.94	63,960,000	5.06

Sumber: DJPK Kemenkeu dan Disparbud Kab. Pangkep (data diolah)

Dari total 61 obyek wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep, hingga tahun 2019 tercatat hanya 7 obyek wisata yang menyumbang terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata kabupaten pangkep yakni bersumber dari 3 wisata bahari dan 4 wisata alam. Hal ini menunjukkan bahwa ada 54 obyek wisata yang belum dioptimalkan potensinya.

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan anggaran dan realisasi penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa anggaran penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep menunjukkan *trend* yang cenderung meningkat setiap tahunnya tetapi hal ini justru berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Pangkep yang selama tahun 2015 hingga 2019 justru berfluktuasi dan menunjukkan *trend* yang cenderung menurun. Dapat dilihat pula bahwa realisasi retribusi penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2019, yang mencapai target hanya pada tahun 2015 dan 2017. Sementara itu untuk tahun 2016, 2018, dan 2019 tidak mencapai target. Bahkan untuk realisasi tahun 2019 hanya mencapai Rp 63.960.000,- yakni hanya berkisar 27.84 persen dibanding anggaran yang telah ditetapkan di awal.



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangkep (data diolah)

Gambar 1.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Pangkep Periode 2015-2019

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Pangkep” dengan menggunakan variabel jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah sektor pariwisata sebagai variabel independen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019?
2. Apakah jumlah obyek wisata berpengaruh terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019?
4. Apakah belanja pemerintah sektor pariwisata berpengaruh terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di kabupaten Pangkep tahun 2006-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah pokok penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah obyek wisata terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor pariwisata terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pertumbuhan ekonomi, dan belanja pemerintah sektor pariwisata terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019. Kemudian diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh otoritas-otoritas yang berwenang dalam pengambilan kebijakan terkait

Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Pangkep. Selain itu diharapkan pula menjadi tambahan referensi untuk melengkapi referensi yang sudah ada agar nantinya dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adelina (2013) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Rondonuwu et al. (2016) menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pendapatan yang diperoleh atau dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) dana perimbangan yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, diantaranya yakni dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah, dana

darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD, karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah luar daerah yang bersangkutan (non-PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan adanya penggalian dan peningkatan PAD diharapkan pemerintah

daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan bantuan dana dari pemerintah di luar daerah yang bersangkutan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber-sumber PAD di atas memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan. Namun demikian, kontribusi terbesar dalam menyumbang penerimaan PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai sumber utama PAD, pemerintah senantiasa mendorong peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut melalui

penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan keadaan. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Sidik, 2002).

Pajak merupakan fungsi dari PDB/PDRB, oleh karenanya dalam kondisi *ceteris paribus*, penerimaan pajak akan selalu mempunyai korelasi positif terhadap perkembangan PDB/PDRB. Lebih dari itu, sesuai dengan sifat-sifatnya, pada saat PDB/PDRB meningkat maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Terdapat dua ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat sensitivitas penerimaan pajak terhadap kenaikan PDB/PDRB yaitu *tax buoyancy* dan elastisitas pajak, keduanya mengukur seberapa besar sensitivitas penerimaan pajak bila terjadi perubahan PDB/PDRB. Hal ini dilakukan untuk menguji kinerja dari sistem pajak dan juga keadilan pajak dan efisiensi dari sistem tersebut sebagai bahan evaluasi efektivitas strategi pajak suatu negara. Perbedaan kedua ukuran tersebut terletak pada data yang digunakan. *Tax buoyancy* tidak

memperhatikan perubahan penerimaan pajak yang disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur pajak, sedangkan elastisitas pajak memperhitungkan perubahan penerimaan pajak yang disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur perpajakan (Sjafri, 2006).

Pungutan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tarif yang dikenakan, kualitas dan kuantitas jasa pelayanan yang diberikan, serta tuntutan kebutuhan masyarakat atas jasa pelayanan tersebut. Selanjutnya untuk pelaksanaan di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah.

2.1.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah atau dalam istilah asing biasa disebut *User Charge* memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada pembayar retribusi (Pleanggra & Yusuf, 2012). Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang berupa pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi setiap orang diberi kebebasan dalam melakukan pembayaran biaya retribusi. Jika seseorang telah membayar biaya retribusi, maka pemerintah daerah

maupun swasta wajib untuk memberikan manfaat langsung kepada orang tersebut atas biaya yang telah dibayarkan olehnya.

Dewantoro (2001), menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis retribusi yang bisa menjadi sumber pungutan daerah yaitu (1) retribusi jasa umum, yang berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan daerah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan; (2) retribusi jasa usaha, yang berupa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil; (3) retribusi perizinan tertentu, yang berupa kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan tertentu atau pribadi untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumberdaya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.4 Industri Pariwisata

Dalam UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Sektor kepariwisataan sebagai salah satu primadona dalam pembangunan industri dikembangkan dalam rangka meningkatkan laju pembangunan nasional. Sektor kepariwisataan terbukti mampu menopang perekonomian rakyat dan sekarang ini keberadaannya sangat diperlukan

dan merupakan salah satu sektor penting untuk memperoleh devisa dan peningkatan penerimaan pemerintah (Hakim, 2012).

“Industrial tourism can be a source of profitable differentiation for a tourism destination, taking advantage of its particular industrial resources to generate potentially distinctive and memorable experiences. These resources are part of its culture, a feature of what the particular locality was, is and, perhaps, what it will be. A number of successful cases around the globe demonstrate that there are no prima facie reasons for not exploiting this potential” (Otgaar et al., 2010).

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pengertian industri pariwisata disini lebih cenderung memberikan pengertian bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Kepariwisataan atau industri pariwisata memiliki keterkaitan sektoral yang sangat banyak, antara lain terhadap berkembangnya ekonomi akibat pembangunan sarana dan prasarana, berkembangnya usaha dan industri baru di sektor riil, berkembangnya usaha dan industri baru di sektor jasa, berkembangnya industri kreatif serta berbagai *spillover effect* baik positif maupun negatifnya.

Ariyanto (2005) mengatakan bahwa ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) *attraction* (daya tarik), dimana daerah tujuan wisata dalam menarik wisatawan hendaknya memiliki daya tarik baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya; (2) *accessible* (bisa dicapai),

hal ini dimaksudkan agar wisata domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata; (3) *amenities* (fasilitas), syarat yang ketiga ini memang menjadi salah satu syarat Daerah Tujuan Wisata (DTW) dimana wisatawan dapat dengan nyaman tinggal lebih lama di daerah tersebut; (4) *ancillary* (adanya lembaga pariwisata) dalam hal ini adanya lembaga pariwisata wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan (*protection of tourism*) dan terlindungi.

Yoeti (2008) menyatakan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa industri pariwisata tergantung pada hal-hal sebagai berikut yakni (1) harga, dimana pada kebanyakan industri jasa harga biasanya menjadi masalah kedua karena yang terpenting adalah kualitas yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan sesuai dengan waktu yang diinginkan; (2) daya tarik wisata, dimana keputusan untuk melakukan perjalanan lebih banyak menyangkut pemilihan daerah tujuan wisata yang ditentukan oleh daya tarik yang terdapat di daerah yang akan dikunjungi; (3) kemudahan berkunjung (aksesibilitas) ke daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi banyak mempengaruhi pilihan wisatawan, wisatawan menginginkan tersedianya macam-macam transportasi yang dapat digunakan dengan harga yang bervariasi. Karena biaya transportasi akan mempengaruhi biaya perjalanan secara keseluruhan; (4) informasi dan layanan sebelum kunjungan wisatawan biasanya memerlukan *pre-travel*

service di daerah tujuan wisata yang mereka kunjungi dan tersedia *tourist information service* yang dapat menjelaskan tempat-tempat yang akan dikunjungi wisatawan, kendaraan yang digunakan, waktu perjalanan dan keperluan yang dibutuhkan; (5) citra, dimana wisatawan memiliki kesan dan impian tersendiri tentang daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi. Citra dari daerah tujuan wisata akan mempengaruhi permintaan wisata daerah tersebut.

“Growth in the tourism sector can at least be used in three major ways: first, increase regional and seasonal employment and, as a special type of export, tourism growth generates foreign currency. Second, tourism development promotes the growth of transport sector, hospitality industry, and construction in the host country. Third, tourism growth can be used by policymakers to contract income inequalities in the host country” (Tugcu dalam Kyara et al., 2021).

Sari (2018) menyebutkan bahwa peranan pariwisata saat ini antara lain adalah (1) peranan ekonomi, yaitu sebagai sumber devisa negara; (2) peranan sosial, yaitu sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan (3) peranan kebudayaan, yaitu memperkenalkan kebudayaan dan kesenian.

2.1.5 Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata

Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Pengenaan retribusi erat kaitanya dengan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*). Dengan demikian, retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Natalia & Nugroho (2015) mengemukakan bahwa retribusi pariwisata adalah pungutan yang

dibebankan pada pengunjung dan pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas kunjungan tempat pariwisata atau pemakaian tempat-tempat pariwisata yang digunakan oleh pengunjung dan pedagang yang ada didalamnya.

Hastuti (2010) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga jenis retribusi yang termasuk dalam retribusi sektor pariwisata yaitu (1) retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang merupakan pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan/penyediaan fasilitas yang terdiri dari tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olahraga, tidak termasuk pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh swasta. Adapun subyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan/penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; (2) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang merupakan pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta. Obyek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan/penyediaan fasilitas penginapan/ pesanggrahan/villa yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun subyek retribusi tempat penginapan/

pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa; (3) retribusi izin usaha pariwisata yang merupakan pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang pariwisata. Obyek retribusi izin usaha pariwisata adalah pemberian izin usaha di bidang pariwisata yang meliputi perizinan usaha jasa pariwisata, perizinan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, dan perizinan usaha sarana pariwisata. Adapun subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha di bidang pariwisata

2.1.6 Wisatawan

Pendit (2003) menjelaskan bahwa wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukrela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Rifai (2019) menambahkan wisatawan adalah pengunjung di negara yang di kunjungi setidaknya-tidaknya tinggal 24 jam dan yang datang berdasarkan motivasi.

Seorang ahli kepariwisataan berkebangsaan Inggris yang bernama P.W.Ogilive, didalam buku yang ditulis oleh Yoeti (2001), melihat pariwisata dari segi bisnis sehingga memberikan definisi Wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, pertama bahwa mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan kedua

bahwa sementara mereka pergi, mereka mengeluarkan uang di tempat yang mereka kunjungi tidak dengan mencari nafkah di tempat tersebut.

Karyono (1997) menjelaskan bahwa perjalanan yang dilakukan wisatawan dapat dibedakan berdasarkan sifat perjalanannya, yaitu (1) *foreign tourist* (wisatawan mancanegara) yang merupakan orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan Negara dimana ia bisa tinggal; (2) *domestic foreign tourist* yang merupakan orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal disuatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara dimana ia tinggal; (3) *domestic tourist* (wisatawan nusantara) yakni seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya; (4) *indigenous foreign tourist* yakni warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri; (5) *transit tourist* yakni wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri; (6) *business tourist* yakni orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuan yang utama telah selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan.

2.1.7 Obyek Wisata

Islamiyah (2018) menjelaskan bahwa objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya. Suatu objek wisata menurut Yoeti (2001) harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu (1) daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai "*something to see*" (sesuatu untuk dilihat), artinya, di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain (pemandangan alam, upacara adat, kesenian) yang dapat dilihat oleh wisatawan; (2) daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah "*something to do*" (sesuatu untuk dikerjakan), artinya, di tempat tersebut tersedia fasilitas rekreasi yang membuat mereka betah untuk tinggal lebih lama di tempat itu (penginapan/hotel yang memadai, kolam renang, sepeda air) sehingga mereka dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat wisata lainnya; (3) daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah "*something to buy*" (sesuatu untuk dibeli), artinya, di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (*shopping*), terutama *souvenir* dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing.

Sa'idah (2017) mengemukakan bahwa bahan dasar yang perlu dimiliki oleh industri pariwisata dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu (1) objek wisata alam (*natural resources*), dimana bentuk dari objek ini berupa pemandangan alam seperti pegunungan, pantai, flora dan fauna atau bentuk yang lain; (2) objek wisata budaya atau manusia (*human resources*), dimana objek ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan/kehidupan manusia seperti museum, candi, kesenian, upacara keagamaan, upacara adat, upacara pemakaman atau bentuk yang lain; (3) objek wisata buatan manusia (*man made resources*), dimana objek ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia sehingga bentuknya tergantung pada kreativitas manusianya seperti tempat ibadah, alat musik, museum.

2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya

pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Nurhidayah, 2020).

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa teori pertumbuhan dimana para ekonom mempunyai pandangan yang berbeda tentang proses pertumbuhan suatu perekonomian. Namun dalam teori pertumbuhan ekonomi modern atau yang lebih dikenal dengan teori pertumbuhan Rostow dan Kunznet menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu transformasi dari suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang melalui lima tahapan, yaitu tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan masyarakat berkonsumsi tinggi.

2.1.9 Belanja Pemerintah Sektor Pariwisata

Belanja pemerintah adalah belanja untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pembiayaan pemerintah terkait kebutuhan administrasi pemerintah dan agenda pembangunan. belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Model perkembangan pengeluaran Pemerintah oleh Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi-investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu pada tahap ini, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam

posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya (Lestari, 2017).

Dalam UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada pasal 11 ayat (5) dan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XI/2013, dinyatakan bahwa belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan menjadi per fungsi dan organisasi. Pengklasifikasian berdasarkan fungsi dibagi menjadi 11 fungsi yang menyangkut beberapa aspek dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, agama, pendidikan, perlindungan sosial, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Belanja pemerintah menurut fungsi menggambarkan fokus pemerintah dalam melaksanakan berbagai prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja pemerintah untuk sektor pariwisata meliputi pembinaan, promosi, dan lain-lain. Promosi yang dimaksud terkait dengan periklanan, misalnya iklan perhotelan, rumah makan, industri pengolahan yang terkait pariwisata, dan sektor jasa lainnya yang terkait. Seluruh pengeluaran ini akan tertera dalam belanja barang pada pengeluaran rutin pemerintah.

2.1.10 Kaitan Teoritis Jumlah Wisatawan dan Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata

Yoeti (2008) mengemukakan bahwa kedatangan wisatawan mancanegara atau nusantara merupakan sumber penerimaan bagi daerah atau negara, baik dalam bentuk devisa atau penerimaan pajak dan retribusi lainnya, disamping dapat meningkatkan kesempatan kerja. Nurhidayati (2011) menambahkan bahwa suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang sebagai konsumen sementara. Jika wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut sangat banyak, maka pengeluaran uang untuk membeli berbagai keperluan selama liburannya akan berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Rahmi (2016) juga menjelaskan bahwa semakin lama wisatawan menginap dalam setiap kunjungan wisata, maka secara langsung pengaruh ekonomi dari keberadaan wisatawan tersebut juga semakin meningkat. Pengeluaran wisatawan tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (PAD), pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan.

Oleh karenanya, semakin banyak wisatawan yang berkunjung pada suatu daerah maka penerimaan retribusi sektor pariwisata juga akan mengalami peningkatan.

2.1.11 Kaitan Teoritis Obyek Wisata dan Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata

Salah satu faktor yang membuat seseorang untuk mengunjungi suatu daerah adalah karena adanya obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi di daerah tersebut. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan atau membuka obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi (Qodarrochman, 2010). Dengan tersedianya banyak pilihan obyek wisata, tentunya akan meningkatkan daya tarik pariwisata bagi daerah yang bersangkutan.

Jumlah obyek wisata bisa bertambah maupun berkurang setiap tahunnya. Penambahan dapat terjadi apabila pemerintah daerah membangun obyek wisata baru, yaitu berupa obyek wisata buatan, atau membuka obyek wisata alam yang sebelumnya tertutup untuk umum. Sedangkan pengurangan bisa terjadi apabila pemerintah daerah menutup obyek wisata dikarenakan sedang dalam perbaikan atau tidak adanya dana untuk melakukan perawatan terhadap suatu obyek wisata sehingga ditutup untuk umum.

Oleh karenanya, semakin banyak obyek wisata yang tersedia di suatu daerah, maka sumber penerimaan retribusi sektor pariwisata juga

akan semakin besar yang berarti akan berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi sektor pariwisata itu sendiri.

2.1.12 Kaitan Teoritis Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dijadikan sebagai patokan dalam melihat kemajuan daerah dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan bagaimana kemakmuran rakyat karena dilihat berdasarkan pendapatan per-kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara. Todaro (2000) menyatakan bahwa pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian). Salah satu sektor yang dinilai mengalami peningkatan permintaan yakni sektor pariwisata. Pariwisata dipandang sebagai salah satu jasa yang sangat disukai (*Preferred goods or services*), hal ini dikarenakan pariwisata lebih banyak dilakukan ketika pendapatan meningkat. Ketika jumlah keluarga yang memasuki kelompok pendapatan lebih tinggi semakin meningkat, maka permintaan untuk berwisata

meningkat lebih cepat dari pendapatan yang kemudian akan berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi sektor pariwisata.

Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga merupakan salah satu indikator yang mampu menarik minat investor untuk berinvestasi pada daerah tersebut. Kegiatan investasi ini dilakukan diberbagai sektor yang dinilai mampu memberikan keuntungan di masa depan bagi investor, tidak terkecuali sektor pariwisata. Investasi di sektor pariwisata yang dilakukan akan mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam memfasilitasi sarana parasana pariwisata dan juga destinasi pariwisata. Hal ini tentunya akan meningkatkan minat para wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut yang kemudian akan meningkatkan penerimaan retribusi sektor pariwisata.

Oleh karenanya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan berpotensi dalam meningkatkan penerimaan retribusi sektor pariwisata.

2.1.13 Kaitan Teoritis Belanja Pemerintah Sektor Pariwisata dan Penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + (X - M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak

pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut.

Untuk membangun perekonomian daerah melalui sektor pariwisata, maka dibutuhkan peran pemerintah yang diharapkan akan mampu membiayai infrastruktur/prasarana dan fasilitas wisata sekaligus mampu mendorong masuknya investasi swasta sektor pariwisata, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan peran pemerintah tersebut dapat dilihat melalui belanja yang dikeluarkan untuk sektor pariwisata. Perbaikan sarana dan prasarana pariwisata akan menarik para wisatawan untuk berkunjung.

Oleh karenanya, perkembangan belanja pemerintah di sektor pariwisata yang lebih baik, akan mendorong penerimaan sektor pariwisata khususnya penerimaan retribusi sektor pariwisata itu sendiri.

2.2 Hasil Penelitian dan Studi Empiris

Sobrowi et al (2021) meneliti mengenai “analisis penerimaan retribusi obyek pariwisata di Kota Jambi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penerimaan retribusi obyek pariwisata, jumlah kunjungan wisata, jumlah hotel, dan jumlah obyek pariwisata di Kota Jambi, serta untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan,

jumlah hotel dan jumlah obyek wisata terhadap penerimaan retribusi obyek pariwisata di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*). Hasil penelitian yang didapat adalah realisasi penerimaan retribusi obyek pariwisata di Kota Jambi rata-rata meningkat sebesar 35,31% dengan jumlah kunjungan wisata rata-rata sebesar 55,74% jumlah hotel rata-rata sebesar 0,50% dan jumlah tempat wisata rata-rata sebesar 0,37%. Sedangkan hasil uji t diketahui bahwa secara parsial jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan retribusi obyek pariwisata di Kota Jambi dengan nilai signifikan $P < 0,05$.

Sutrisno (2013) meneliti mengenai “analisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah hotel, dan PDRB terhadap retribusi pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian yang didapat adalah secara keseluruhan variabel obyek wisata, jumlah hotel, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi pariwisata kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Rahma & Handayani (2013) meneliti mengenai “pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus”. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode analisis *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian yang didapat adalah secara keseluruhan variabel jumlah

kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di kabupaten kudus.

Zahari (2017) meneliti mengenai “pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi”. Model analisis yang digunakan yakni analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jambi.

Susanti et al (2017) meneliti mengenai “analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah aceh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh setelah tsunami”. Model analisis yang digunakan yakni *Ordinary Least Square* (OLS) dengan model regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian parameter secara individual membuktikan bahwa kedua variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi (X1) dan pengeluaran Pemerintah Aceh (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (Y).

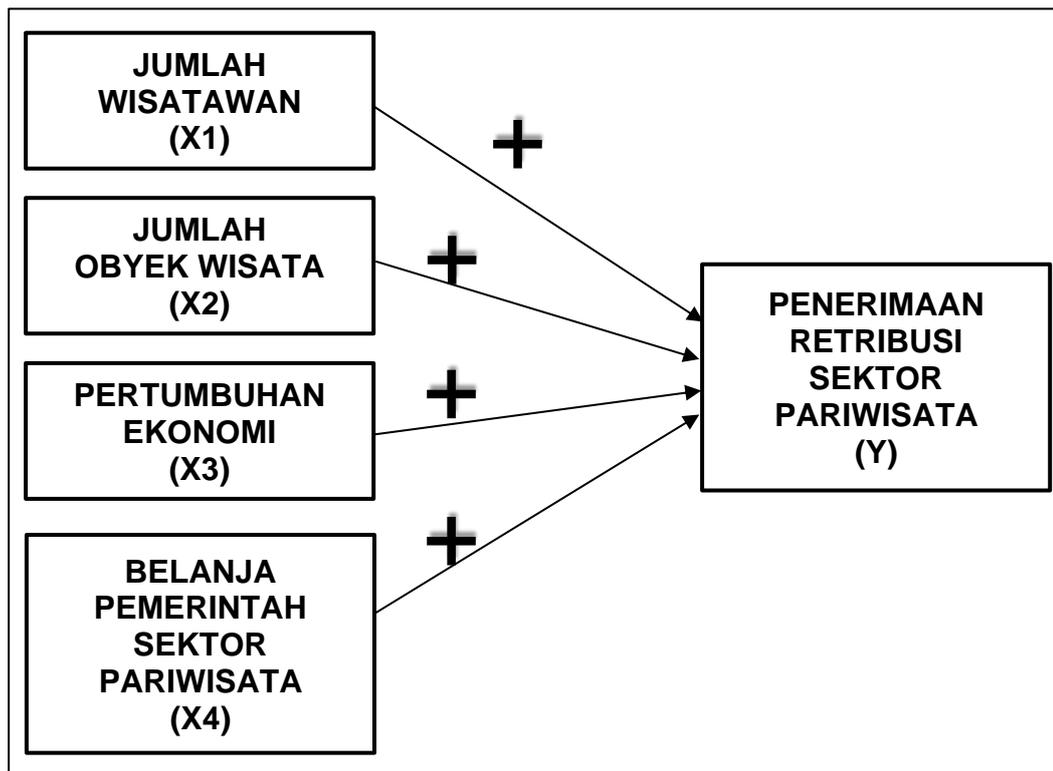
Saptorini et al (2019) meneliti mengenai “pengaruh belanja pembangunan sektor pariwisata dan investasi serta promosi sektor pariwisata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau. Model analisis yang digunakan yakni *Path Analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung variabel belanja pembangunan sektor pariwisata dan promosi sektor pariwisata

tidak berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan, sedangkan investasi berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Belanja pembangunan sektor pariwisata, investasi, promosi sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara tidak langsung Belanja pembangunan sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui kunjungan wisatawan, sedangkan investasi dan promosi sektor pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui kunjungan wisatawan.

Labiran (2013) meneliti mengenai “analisis penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Tana Toraja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah wisatawan, perilaku pemerintah, dan lingkungan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian yang didapat adalah baik secara simultan maupun parsial, variabel jumlah wisatawan, dan PDRB sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata. Sedangkan variabel perilaku pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian analisis penerimaan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Pangkep, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (1) jumlah wisatawan, (2) jumlah obyek wisata, (3) pertumbuhan ekonomi, (4) belanja pemerintah sektor pariwisata. Variabel-variabel tersebut digunakan agar peneliti lebih terarah dalam menemukan data dan informasi dalam penelitian ini agar dapat memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari pemaparan tersebut maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada **Gambar 2.1** maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019.
2. Diduga jumlah obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019.
3. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019.
4. Diduga belanja pemerintah sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Pangkep tahun 2006-2019.